

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya jua buku Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Substansi dari Rencana Strategis ini sudah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Pemerintah Daerah Provinsi Jambi serta mengakomodir isu-isu aktual sektoral memperhatikan parameter-parameter strategis yang mempengaruhi kinerja institusi yang dianalisa sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga dapat mendukung visi Provinsi Jambi **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 .

Dengan tersusunnya perencanaan jangka menengah ini kiranya dapat menjadi acuan untuk perencanaan jangka pendek dan menjadi landasan perencanaan operasional oleh unit-unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi serta menjadi ukuran indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah.

Akhir kata, semoga buku Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat memberi manfaat dan menjadi pedoman bagi yang berkepentingan.

Jambi, September 2025
KEPALA BADAN,

Agus Pirngadi, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	7
1.1 Maksud dan Tujuan	10
1.2 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH ISU DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.2.2 Isu Strategis	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	35
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan	44
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	45
BAB V PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 2. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 2. 3 Rekapitulasi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 2. 4 Rekapitulasi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Tahun 2020-2024.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 2. 7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah</i>	<i>37</i>
<i>Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah.....</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan.....</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....</i>	<i>120</i>
<i>Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah</i>	<i>121</i>
<i>Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci.....</i>	<i>122</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Kedudukan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD.....</i>	<i>36</i>
<i>Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....</i>	<i>36</i>
<i>Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....</i>	<i>46</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan berbasis kinerja, guna mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Pengelolaan Pendapatan Daerah dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, antara lain:

- Masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pusat,
- Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD),
- Perlunya peningkatan efisiensi belanja dan kualitas perencanaan anggaran,
- Penguatan sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi dan real-time,
- Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis akuntabilitas kinerja.

Seiring dengan perkembangan regulasi nasional seperti pelaksanaan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, digitalisasi pelayanan publik, serta transformasi kelembagaan dan sistem pengawasan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi dituntut untuk mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya, meliputi

Perencanaan Pendapatan Daerah, Penatausahaan dan Pelaporan secara profesional dan berintegritas.

Dengan Renstra 2025-2029, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi dapat berperan lebih strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur Pengelolaan Pendapatan Daerah daerah. Berikut ini adalah landasan hukum yang umum digunakan:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

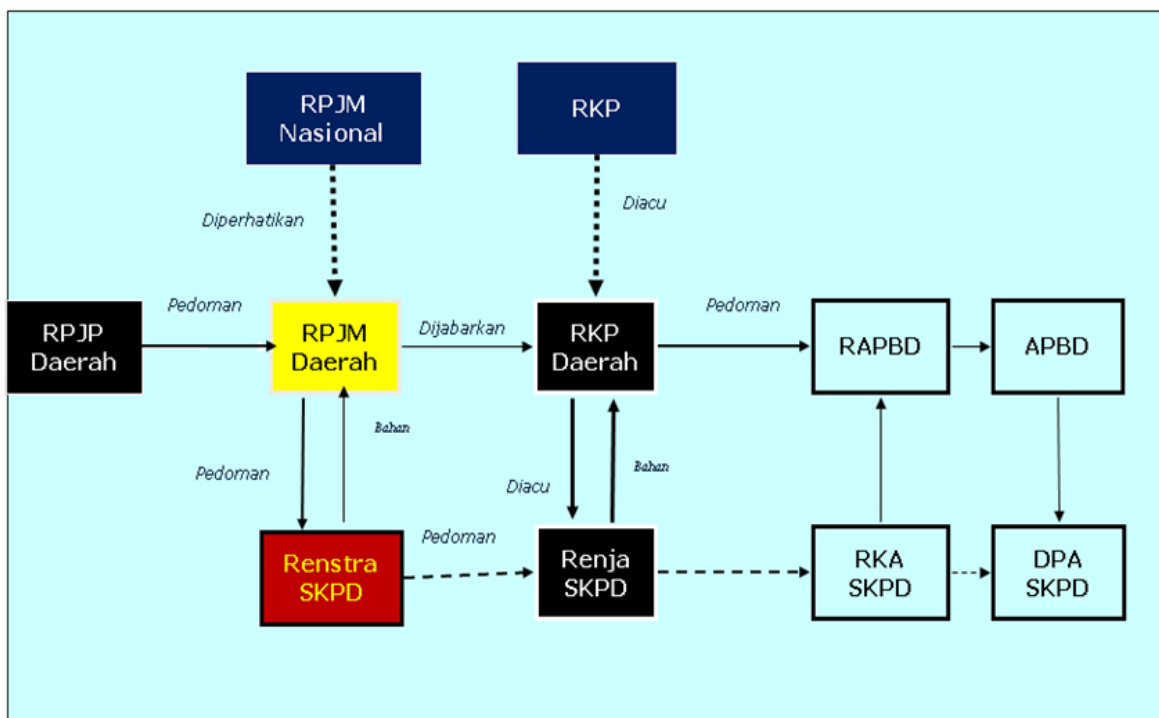
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Permendagri 90 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jambi 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2025 – 2045;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2025 – 2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.

1.1 Maksud dan Tujuan

Ada tiga alasan Pentingnya Perencanaan Strategik;

1. Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk- bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian kegiatan –kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Gambar 1. 1 Kedudukan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah



a. Maksud

Maksud penyusunan RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategik.

2. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
3. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 tahun (2025 – 2029)

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur terkait pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun 2025 – 2029.

1.2 Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 ini terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat daerah.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi

Perangkat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, serta penentuan Isu-isu Strategis.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu Strategis;

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan juga strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Perangkat daerah.

- 3.1. Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 3.2. Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

- 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V : PENUTUP.

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH ISU DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah

2. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah, seperti:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Air Permukaan (PAP)
- Pajak Alat Berat (PAB)
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

3. Pelayanan kepada masyarakat, termasuk:

- Pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan
- Pelayanan Samsat (kerja sama dengan Polri dan Jasa Raharja)
- Pelayanan informasi pajak dan konsultasi

4. Pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah

5. Pengelolaan sistem informasi perpajakan daerah (digitalisasi pelayanan dan basis data)

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Nomor ... Tahun ... adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di

bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- e. pelaksanaan tugas di bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagi hasil dan pendapatan lain-lain;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

- a. Perencanaan, meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas.
- b. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah daerah serta pemungutan Aset Daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan-perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kepada aparatur pemerintah.
- d. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan guna mendukung kinerja pemungutan.

- e. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan peningkatan Pendapatan daerah.
- f. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan daerah, penetapan tata tarif, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Aset Lain-lain Yang Sah.
- h. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan Pendapatan yang baik serta dalam menggali sumber-sumber Pendapatan baru.
- i. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan pengelolaan Pendapatan daerah.
- j. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi berdasarkan Rancangan Pergub Jambi tentang SOTK Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan 3 (empat) orang Kepala Bidang dalam Provinsi Jambi.

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah daerah serta aset daerah, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup Badan dan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan perumusan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Sekretariat dan Badan;
- c. pengoordinasian dan perancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi lingkup Sekretariat meliputi pelayanan perencanaan dan pelaporan program, keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, dan pedoman terkait tugas dan fungsi Sekretariat;
- e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkup Badan dan Sekretariat;
- f. pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan, dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
- i. pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- j. pembinaan penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, peralatan, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengembangan perencanaan program dan pelaporan, keuangan dan aset, serta administrasi umum dan kepegawaian;
- l. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- (DPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lingkup Badan, dan Laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan pelayanan publik Badan;
 - n. pengoordinasian penyusunan bahan rancangan peraturan, standar operasional prosedur, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
 - o. pengoordinasian pengkajian dan verifikasi terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial yang menjadi urusan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. pengoordinasian dan fasilitasi tindak lanjut laporan Hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
 - q. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian melalui lembaga bersertifikasi; dan
 - r. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan

Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya perencanaan, pengembangan, pelaporan dan peraturan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan rencana strategis program optimalisasi Pendapatan

- Daerah dan kajian pengembangan potensi sumber Pendapatan Daerah;
- c. pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan dengan instansi terkait;
 - d. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Pendapatan Daerah;
 - e. pengoordinasian dan fasilitasi Perangkat Daerah dalam rangka Perencanaan Pendapatan Daerah, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Peraturan Pendapatan Daerah;
 - f. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran bidang;
 - g. menyelenggarakan penyusunan kinerja belanja intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah, perencanaan kinerja dan pengembangan layanan pendapatan Daerah.
 - h. pelaksanaan penyusunan konsep perjanjian kerja sama dan produk hukum lainnya aspek Pendapatan Daerah;
 - i. penyelenggaraan penghitungan alokasi dan penetapan serta koordinasi belanja bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

- b. Penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- c. Penyusunan bahan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. Perumusan perhitungan tarif dan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penetapan tarif Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi koordinator Pajak Daerah pada UPTD pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. Penyelenggaraan pengkajian penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pandangan umum DPRD terhadap rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD dan aspek Pendapatan;
- h. Menyelenggarakan pengendalian penerimaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Rekening Kas Umum Daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Rekening Kas Umum Daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring pengelolaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Rekening Kas Umum Daerah;
- k. Penyelenggaraan intensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

1. Penyelenggaraan himbauan dan/atau sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan teknologi Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kinerja Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan teknologi Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- b. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan operasional dan pelayanan Pendapatan Daerah;
- c. penyelenggaraan evaluasi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- d. menyelenggarakan monitoring dan sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan Pendapatan Daerah;
- e. menyelenggarakan evaluasi implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah;
- f. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemungutan Pendapatan Daerah;
- g. pelaksanaan mitigasi resiko pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. memberikan saran dan rekomendasi kepada kepala Badan atas pelaksanaan kegiatan pengendalian , pengawasan dan evaluasi Pendapatan Daerah;
- i. koordinator penyelenggaraan pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

- j. koordinator jurusita Pajak Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan Pendapatan Daerah;
- l. menyelenggarakan pengelolaan infrastruktur dan tata kelola, meliputi perencanaan dan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan komunikasi, pengembangan sumber daya penyusunan TIK, Renstra TIK dan penyusunan proses bisnis TIK;
- m. menyelenggarakan pengelolaan data dan aplikasi, meliputi rekayasa aplikasi, integrasi, interoperabilitas serta pengelolaan data dan aplikasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi Pendapatan Daerah;
- o. pelaksanaan pemeliharaan basis data Pendapatan Daerah;
- p. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi serta infrastruktur jaringan layanan;
- q. melaksanakan pengelolaan keamanan data dan aplikasi serta sistem informasi layanan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

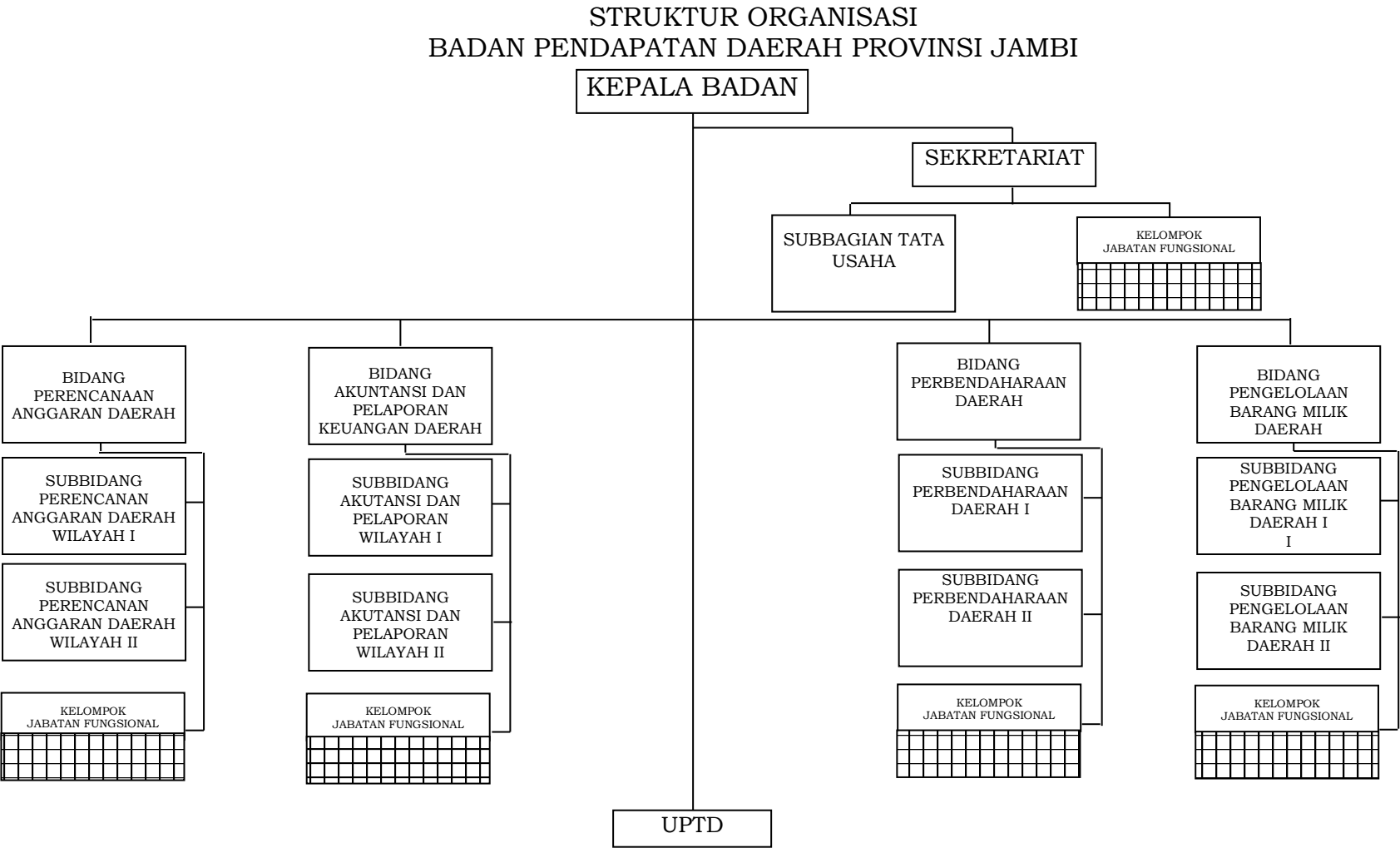
Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan. Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas Badan dapat membentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Sumber daya manusia mengacu pada segala bentuk sumber daya yang dimiliki dan digunakan oleh **Perangkat Daerah** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan pemerintahan daerah. Perangkat Daerah sendiri adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah, seperti dinas, badan, sekretariat, atau kantor.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) orang, terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) orang PNS dan 50 (lima puluh) orang tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berdasarkan jenis kelamin, PNS terdiri dari 64 (enam puluh empat) orang laki-laki dan 30 (tiga puluh) orang perempuan, sedangkan untuk tenaga PTT terdiri dari 31 (tiga puluh satu) orang laki-laki dan 19 (sembilan belas) orang perempuan. Dan jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah PNS paling banyak berpendidikan Strata Satu (S1), yaitu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang atau 60,64% persen dari jumlah PNS yang ada. Komposisi jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikannya pada tahun 2024 dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

1. Data Jumlah Pegawai (Sumber Daya Manusia) Dalam pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi pada tahun 2025 didukung oleh 94 orang PNS dan 53 Tenaga Pegawai Tidak Tetap. Komposisi sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
PNS	59 Orang	35 Orang	94 Orang
PTT	20 Orang	33 Orang	53 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	10	9	19
2.	Strata 1 (S1)	34	23	57
3.	Diploma 3	6	3	9
4.	SLTA	5	4	9
	Jumlah	55	39	94

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Jenis Kelamin Total Laki-laki Perempuan PNS 64 orang 30 orang, 50 orang Pegawai Tidak Tetap 31 orang 19 orang 50 orang Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	14
3	Eselon IV	37
4	Fungsional Umum	169
Jumlah		221

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV/d	1
2	IV/c	0
3	IV/b	3
4	IV/a	31
5	III/d	92
6	III/c	29
7	III/b	28
8	III/a	21
9	II/d	9
10	II/c	4
11	II/b	1
12	II/a	0
13	PPPK	2
Jumlah		221

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi merujuk pada fasilitas- fasilitas yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung digunakan dalam proses kerja, seperti ; perlengkapan kantor, kendaraan dinas, atau alat kerja lainnya. Sementara prasarana adalah fasilitas yang menunjang sarana, seperti ; bangunan/ruang kantor, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, yang diperlukan untuk mendukung kinerja perangkat daerah/ Badan Pendapatan . Adapun rincian sarana dan prasarana/aset yang dimiliki antara lain:

1. Gedung dan bangunan.

Gedung dan bangunan terdiri dari bangunan gedung tempat kerja yang difungsikan sebagai : bangunan gedung kantor, bangunan gedung UPTD, bangunan gudang, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat pertemuan, bangunan gedung untuk pos jaga, bangunan gedung garasi/pool, bangunan gedung perpustakaan, bangunan gedung tempat kerja lainnya, gedung fasilitas umum, bangunan parkir, bangunan tempat tinggal.

2. Peralatan dan Inventarisasi Kantor.

Terdapat berbagai peralatan kantor diantaranya komputer, printer, mesin fotocopy, meja kursi dan lemari arsip yang mendukung pelaksanaan tugas sehari – hari. Semua aset dicatat dan dikelola secara tertib melalui sistem inventarisasi.

3. Kendaraan/operasional.

Kendaraan roda empat dan roda dua yang digunakan untuk mendukung mobilitas pegawai dan kegiatan operasional lapangan.

4. Sarana penunjang lainnya.

Termasuk fasilitas jaringan internet, sistem keamanan (CCTV), perangkat audio-visual, serta perlengkapan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Provinsi Jambi serta untuk meningkatnya pendapatan, diperlukan penguatan sarana dan prasarana secara bertahap selama periode lima tahun ke depan, serta keterbatasan SDM dan peralatan saat ini. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi mencakup:

1. Sarana Mobilitas dan Operasional Lapangan.

- Penambahan kendaraan operasional (roda dan roda empat untuk menunjang Samsat Keliling dan penagihan pajak.
2. Perangkat teknologi dan pengelolaan data perpajakan.
- Komputer, server dan perangkat lunak pemetaan (GIS) dan pemutakhiran data wajib pajak
 - Sistem digitalisasi.
 - Alasan ; mendorong efesiensi pelayanan, akurasi perencanaan dan transparansi pengelolaan pendapatan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode lima tahun terakhir, Badan Pendapatan Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja SKPD sesuai Renstra Tahun 2021 - 2026, sebagian besar program dan kegiatan Badan Pendapatan Provinsi Jambi sudah terlaksana. Berikut disampaikan gambaran kinerja /pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi tahun 2020 – 2024 dan evaluasi Indikator kinerja pelayanan tahun 2021 – 2026.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Skor IKM	Nilai	86,20	86,40	86,60	86,80	87,00	86,53	86,80	86,95	87,15
2	Predikat AKIP	Nilai	73,00	74,00	75,00	76,00	79,00	74,35	80,15	81,96	81,10
3	Persentase Peningkatkan pendapatan asli daerah	%			5,25%	5,70%	6,10%		12,12%	-8,84%	-6,07%

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Program Renstra Perangkat Daerah	Satuan	Target Pagu Anggaran Prangkat Daerah Pada Tahun Ke			Realisasi Pagu Anggaran Pada Tahun ke			Persentase Capaian Pada Tahun ke (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	9	10	11	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rupiah	91.672.684.421,00	92.618.563.667,00	90.604.976.871,00	85.963.327.661,00	91.272.962.253,00	86.643.416.995,83	93,77%	98,55%	95,63%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rupiah	15.087.213.569,00	14.623.505.531,00	14.362.340.611,00	14.875.860.137,52	14.383.189.221,00	13.367.366.357,00	98,60%	98,36%	93,07%

Gambar 2. 2 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi sangat beragam. Secara umum, kelompok sasaran tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah

- Masyarakat umum, pelaku usaha, dan badan hukum yang menjadi subjek pajak/retribusi daerah (misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak alat berat, dan lain-lain).
- Mendapat layanan pendaftaran, pembayaran, konsultasi, keberatan, serta penyelesaian sengketa pajak/retribusi.

2. Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota, TAPD, dan OPD)

- Memerlukan data, laporan, dan informasi terkait penerimaan pendapatan daerah untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- Mendapatkan layanan asistensi terkait target, realisasi, dan potensi PAD.

3. Pegawai/ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Mendapat layanan administrasi pendapatan, terutama bendahara penerimaan di OPD yang menyetor pendapatan ke kas daerah.

4. Lembaga Pengawas dan Pemeriksa

- BPK, BPKP, Inspektorat Daerah sebagai pihak pengawas/pemeriksa membutuhkan akses laporan dan data pendapatan daerah.

5. Masyarakat Umum dan Dunia Usaha

- Memerlukan informasi transparan terkait penggunaan pajak/retribusi untuk pembangunan daerah.
- Mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan pajak/retribusi dan akses layanan pengaduan.

6. Pemerintah Pusat dan Lembaga Terkait

- Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan instansi lainnya membutuhkan laporan pendapatan daerah dalam rangka monitoring transfer ke daerah, kebijakan fiskal nasional, dan integrasi sistem keuangan negara.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain:

1. Pendaftaran, Penetapan, dan Pemungutan Pajak/ Retribusi Daerah

- Rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- Data objek dan subjek pajak/retribusi belum lengkap atau tidak mutakhir.
- Masih adanya potensi kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan.
- Proses pelayanan yang masih manual di beberapa jenis pajak/retribusi.

2. Pembayaran dan Penyetoran Pendapatan Daerah

- Keterbatasan akses kanal pembayaran non-tunai, khususnya di daerah terpencil.
- Kendala integrasi sistem pembayaran dengan perbankan/penyedia jasa keuangan.
- Keterlambatan penyetoran pendapatan oleh bendahara penerimaan OPD.

3. Pelaporan dan Informasi Pendapatan Daerah

- Keterlambatan penyampaian laporan realisasi penerimaan oleh unit terkait.
- Kualitas data pendapatan daerah masih kurang akurat.
- Transparansi informasi pendapatan ke publik masih terbatas.

4. Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan

- Sulitnya melakukan pengawasan langsung terhadap wajib pajak besar/tertentu.
- Proses penagihan piutang pajak/retribusi daerah masih lemah.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk pengawasan berbasis data.

5. Sumber Daya Manusia dan Teknologi

- Jumlah dan kompetensi pegawai pengelola pajak/retribusi belum merata.
- Kurangnya pelatihan teknis bagi petugas pelayanan pajak/retribusi.
- Sistem informasi pajak/retribusi daerah belum sepenuhnya terintegrasi (antara pusat, daerah, dan perbankan).

6. Pelayanan Publik

- Layanan konsultasi, keberatan, atau pengaduan wajib pajak belum sepenuhnya responsif.
- Prosedur pelayanan masih dianggap berbelit oleh masyarakat.
- Minimnya sosialisasi aturan dan prosedur kepada wajib pajak/retribusi.

2.2.2 Isu Strategis

1. Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak/Retribusi

- *Tingkat kepatuhan pajak daerah masih rendah.*
- *Masih ada potensi kebocoran dan penghindaran pajak/retribusi.*
- *Perlunya strategi peningkatan kepatuhan berbasis edukasi, insentif, dan penegakan hukum.*

2. Validitas dan Integrasi Data Pajak/ Retribusi

- *Basis data objek dan subjek pajak belum sepenuhnya valid dan terintegrasi.*
- *Data antara pusat, daerah, dan lembaga keuangan belum sinkron.*
- *Perlu penguatan sistem informasi pajak/retribusi daerah yang modern dan terintegrasi.*

3. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- *Potensi pajak dan retribusi daerah belum tergali maksimal.*
- *Banyak aset/objek pajak yang belum dimanfaatkan optimal.*
- *Perlunya inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi.*

4. Digitalisasi dan Inovasi Layanan

- *Sistem pelayanan pajak/retribusi masih ada yang manual.*
- *Keterbatasan akses kanal pembayaran non-tunai di wilayah tertentu.*

- Perlu transformasi menuju pelayanan berbasis digital (e-tax, e-retribusi, e-billing, mobile apps).

5. Kapasitas SDM Aparatur Pajak/Retribusi

- Kompetensi aparatur belum merata di semua bidang (penetapan, pemungutan, pengawasan, penagihan).
- Minimnya pelatihan dan sertifikasi aparatur pajak/retribusi.
- Perlunya peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur.

6. Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik

- Masih ada persepsi negatif masyarakat terhadap pengelolaan pajak/retribusi daerah.
- Tingkat transparansi pelaporan pendapatan daerah ke publik belum optimal.
- Perlu peningkatan keterbukaan informasi dan layanan pengaduan yang responsif.

7. Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan

- Penagihan piutang pajak masih lemah.
- Pengawasan terhadap wajib pajak besar dan sektor potensial belum maksimal.
- Perlunya penguatan fungsi pemeriksaan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi.

Tabel 2. 7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD - Global			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendaftaran, Penetapan, dan Pemungutan	Kesadaran wajib pajak rendah, basis data pajak/retribusi	Efisiensi pemanfaatan sumber daya	Tuntutan global transparansi dan good	Kebijakan nasional peningkatan	Kebijakan daerah optimalisasi	Peningkatan kepatuhan wajib pajak/retribusi

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD - Global			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
utang Pajak/ Retribusi Daerah	belum akurat, potensi kebocoran penerimaan	fiskal daerah	governance	PAD dan reformasi pajak	pajak/retribusi	ibusi melalui sistem modern dan edukasi
Pembayaran dan Penyetoran Pendapatan Daerah	Keterbatasan kanal pembayaran non-tunai, integrasi sistem perbankan belum optimal, keterlambatan penyetoran	Pengelolaan fiskal berkelanjutan	Tren global digitalisasi transaksi	Gerakan nasional cashless society	Kebijakan daerah pembayar non-tunai	Optimalisasi sistem pembayaran dan penyetoran berbasis digital
Pelaporan dan Informasi Pendapatan Daerah	Keterlambatan pelaporan, kualitas data kurang akurat, transparansi terbatas	Keterbukaan informasi publik	Standar internasional transparansi fiskal	UU Keterbukaan Informasi Publik, reformasi birokrasi	Kebijakan transparansi keuangan daerah	Meningkatkan transparansi dan akurasi laporan pendapatan daerah
Pengawasan, Pemeriksaan, dan	Sulitnya pengawasan wajib pajak besar, lemahnya penagihan	Penegakan hukum dan kepastian fiskal	Good governance global	Kebijakan nasional penguatan pengawa	Kebijakan daerah peningkatan PAD	Penguatan fungsi pengawasan dan penagihan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD - Global			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penagihan	piutang, teknologi belum optimal			san pajak		berbasis teknologi
Sumber Daya Manusia dan Teknologi	Kompetensi aparatur belum merata, minim pelatihan, sistem belum terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi hijau	Transformasi digital global	Program nasional SPBE, digitalisasi perpajakan	Peningkatan kapasitas aparatur daerah	Penguatan SDM dan pengembangan sistem informasi pajak/retribusi terintegrasi
Pelayanan Publik	Layanan konsultasi/pengaduan belum optimal, prosedur rumit, sosialisasi minim	Pelayanan publik yang inklusif	Tuntutan global open government	Reformasi birokrasi nasional, SP4N-LAPOR	Kebijakan daerah pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis transparansi dan partisipasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab tantangan pembangunan daerah, Perangkat Daerah menetapkan tujuan strategis sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Tujuan ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap berbagai program dan kegiatan, serta memastikan sinergi antara kebijakan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Tujuan Perangkat Daerah mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur dalam periode perencanaan, serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahunan. Penetapan tujuan juga mempertimbangkan isu-isu strategis yang relevan, kondisi eksisting, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

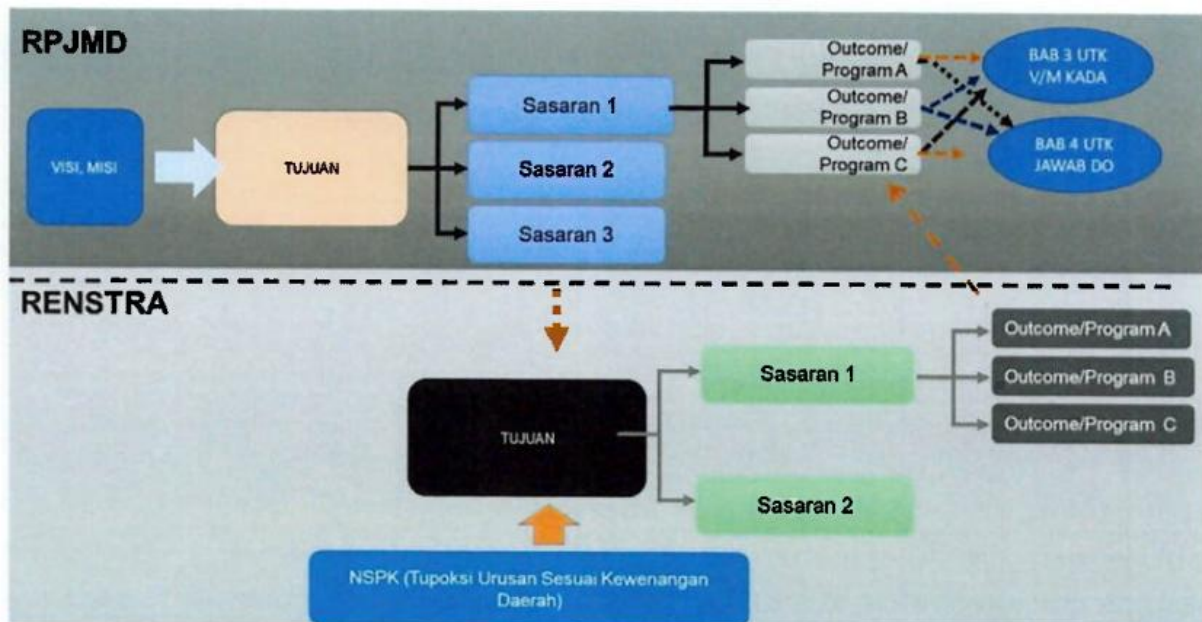
Berdasarkan atau memperhatikan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, maka Tujuan Rencana Strategis Badan Pendapatan Tahun 2025 – 2029 adalah :

“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel” dengan indikator “Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB”.

Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sasaran Renstra PD adalah Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Provinsi Jambi telah menetapkan, merumuskan sejumlah sasaran yang lebih operasional dan terukur.

Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat dirumuskan sebagai berikut :

“ Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)” dengan indikator “Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah”

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Kinerja pada awal periode 2024	Target Tahun						K E T
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4								
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai AKIP	75,11%	75,30%	76,00%	78,00%	80,00%	81,00%	81,50%	
			Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	94,80%	95,10%	95,20%	95,30%	95,40%	95,50%	95,60%	
			Indeks Kepuasan	86,00%	86,20%	86,40%	86,60%	86,80%	87,00%	87,20%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Kinerja pada awal periode 2024	Target Tahun						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4								
			Masyarakat (IKM)								
		Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase Capaian PAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

A. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi Pembangunan provinsi, karena pada dasarnya Pembangunan provinsi merupakan akumulasi dari Pembangunan daerah.

Adapun rumusan strategi Badan Pendapatan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 yang relevan adalah sebagai berikut:

□ Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, edukasi, dan pelayanan berbasis teknologi.
 - Mengembangkan basis data perpajakan/retribusi yang akurat dan terintegrasi.
 - Meningkatkan efektivitas penetapan, pemungutan, dan penagihan pajak/retribusi daerah.
- **Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah**
- Penguatan sistem pembayaran non-tunai (cashless) bekerja sama dengan perbankan dan fintech.
 - Integrasi sistem informasi pendapatan daerah dengan aplikasi nasional (SPBE, SIPD, OSS, dan lainnya).
 - Pemanfaatan big data dan teknologi analitik dalam pengawasan dan perencanaan pendapatan daerah.
- **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan**
- Peningkatan kualitas pelaporan pendapatan yang cepat, akurat, dan transparan.
 - Penguatan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan audit internal untuk mencegah kebocoran PAD.
 - Publikasi informasi pendapatan secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan publik.
- **Penguatan SDM dan Kelembagaan**
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan.
 - Penempatan SDM sesuai kompetensi dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola.
 - Reformasi birokrasi menuju organisasi yang adaptif, responsif, dan profesional.
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
- Penyederhanaan prosedur pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak/retribusi daerah.
 - Penguatan layanan konsultasi, pengaduan, dan edukasi wajib pajak.

- Penerapan prinsip pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan berbasis kepuasan masyarakat.

□ **Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan**

- Meningkatkan kerja sama dengan instansi vertikal (Kementerian Keuangan, DJP, KPK, dll).
- Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pemetaan potensi PAD.
- Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
0,76	0,78	0,8	0,81	0,815
0,952	0,953	0,954	0,955	0,956
0,864	0,866	0,868	0,87	0,872
100%	100%	100%	100%	100%

B. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah : Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Provinsi Jambi 2025-2029.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui monitoring, evaluasi, dan	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menngkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mempertahankan	Penguatan sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah daerah yang transparan,	
3	Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengawasan Pendapatan	Meningkatkan perencanaan, Pengelolaan Pendapatan Daerah dan pengawasan yang terpadu,	Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran,	
4	Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government	Mendorong implementasi e-government melalui integrasi aplikasi layanan pemerintahan dan penguatan regulasi kelembagaan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
5	SPBE dan Infrastruktur TIK	Penerapan kebijakan internal arsitektur SPBE, jaringan intra, sistem penghubung layanan dan kebijakan audit	Penerapan kebijakan internal SPBE dan audit TIK untuk menjamin keamanan, integritas, dan keberlanjutan layanan digital	
6	Pelayanan Publik	Menerapkan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, prima dan	Peningkatan kualitas layanan pajak dan retribusi berbasis digital agar lebih mudah, cepat	
7	Manajemen Informasi dan Aset	menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, dan manajemen TIK dalam rangka meningkatkan	Penguatan tata kelola TIK, keamanan data, dan pengelolaan aset digital untuk mendukung implementasi SPBE	
8	SDM dan Manajemen Pengetahuan SPBE	Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pengetahuan mengenai SPBE	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan SPBE melalui pelatihan, workshop, dan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			knowledge management	
9	Pengaduan Masyarakat	Memberikan wadah/ saluran pengaduan bagi masyarakat, yaitu Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul) (Himpunan	Optimalisasi layanan pengaduan masyarakat berbasis digital untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan serta telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut menjadi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yaitu :

A. Program

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

B. Kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

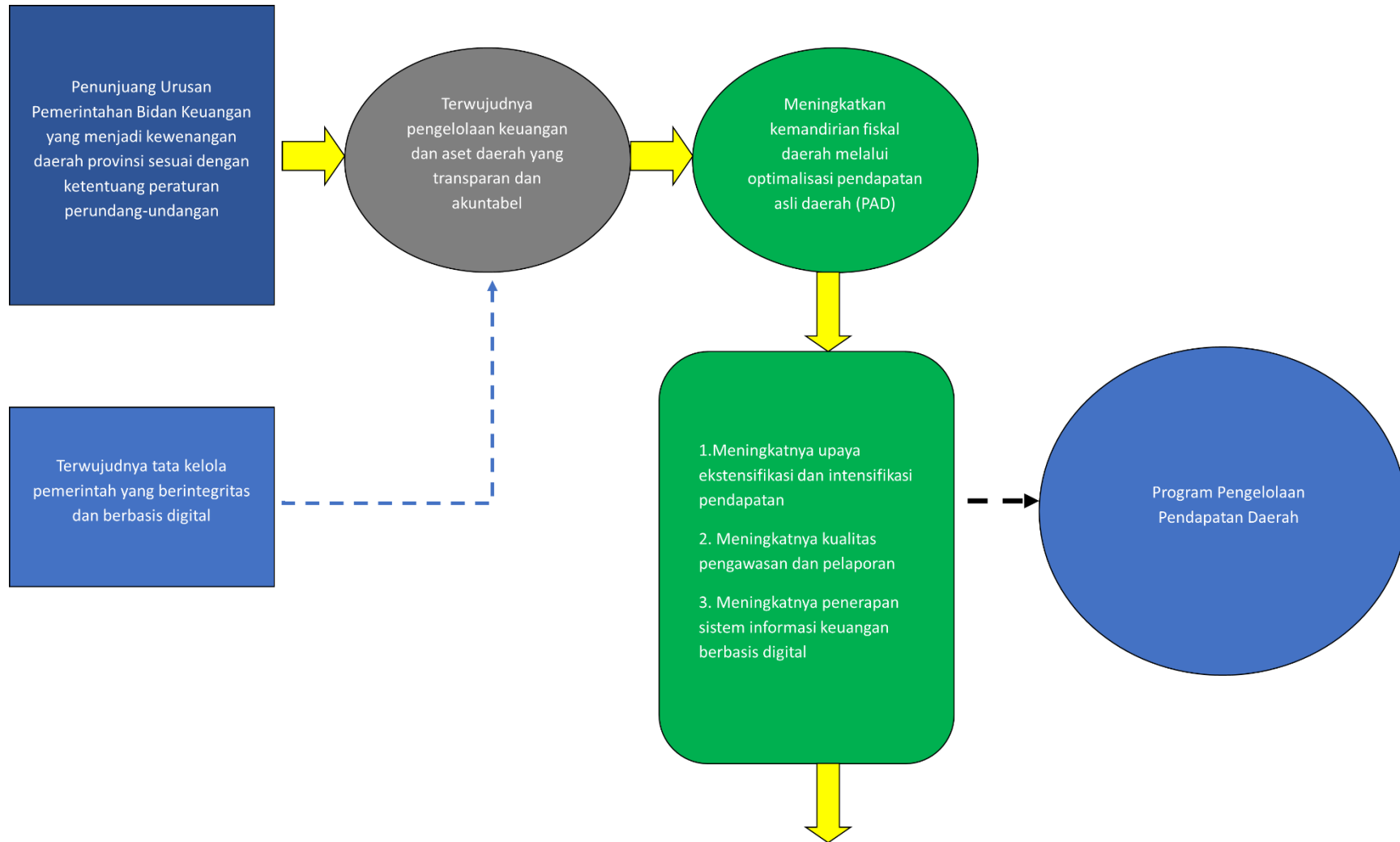
C. Sub Kegiatan

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
6. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
8. Penagihan Pajak Daerah.
9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
14. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah





1 Tersedianya Pendapatan Daerah

1,1 Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

1,2 Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.

1,3 Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

1,4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

1,5 Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

"1,6 Terlaksananya Penetapan Wajib

Pajak Daerah"

1,7 Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

1,8 Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah

2 Tersedianya Pendapatan Daerah

"2,1 Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah"

2,2 Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

2,3 Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

2,4 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

3 Tersedianya Pendapatan Daerah

3,1 Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

3,2 Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai



1 Tersedianya Pendapatan Daerah Persentase Pendapatan Daerah yang diolah

1,1 Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

1,2 Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.

1,3 Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

1,4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

1,5 Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

"1,6 Terlaksananya Penetapan Wajib

Pajak Daerah"

1,7 Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

1,8 Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah

2 Tersedianya Pendapatan Daerah

"2,1 Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah"

2,2 Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

2,3 Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

2,4 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

3 Tersedianya Pendapatan Daerah

3,1 Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

3,2 Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				Opini BPK Atas Laporan Keuangan		
		Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase Peningkatan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Tersedianya Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah yang diolah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
				Tersedianya Analisa dan	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak	Analisa dan Pengembangan Pajak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
				Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					dan Belum Ditindaklanjuti.		
				Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Penagihan Pajak Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
				Tersedianya Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah yang diolah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persentase penerapan sistem Informasi Keuangan berbasis digital		
				Tersedianya Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah yang diolah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				117.832.819. 028		157.322.183. 939		158.800.070. 071		183.077.025. 361		211.683.694. 509		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				93.515.730.9 83		121.992.902. 615		118.765.771. 118		134.122.092. 119		151.795.556. 496		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	75,5	93.515.730.9 83	76	121.992.902. 615	76,5	118.765.771. 118	77	134.122.092. 119	77,5	151.795.556. 496	5.02.0.00.0.00.02.0 000 - Badan Pendapatan Daerah	
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	95	94,9		95		95,1		95,2		95,3			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	86,4		86,6		86,8		87		87,2			
5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				496.934.391		696.321.269		835.585.523		1.002.702.62 8		1.203.243.15 3		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	496.934.391	4	696.321.269	4	835.585.523	4	1.002.702.62 8	4	1.203.243.15 3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.497.475		220.596.970		264.716.364		317.659.637		381.191.564		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	100.497.475	4	220.596.970	4	264.716.364	4	317.659.637	4	381.191.564		
5.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				263.836.916		316.604.299		379.925.159		455.910.191		547.092.229		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	263.836.916	5	316.604.299	5	379.925.159	5	455.910.191	5	547.092.229		
5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				132.600.000		159.120.000		190.944.000		229.132.800		274.959.360		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	132.600.000	2	159.120.000	2	190.944.000	2	229.132.800	2	274.959.360		
5.02.01.1.02 - Administrasi				67.318.134.1 40		74.148.386.4 04		81.659.342.6 64		89.940.638.7 72		99.073.124.9 85		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kuangan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	67.318.134.140	4	74.148.386.404	4	81.659.342.664	4	89.940.638.772	4	99.073.124.985		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	225	225		225		225		225		225			
5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				66.533.745.640		73.187.120.204		80.505.823.224		88.556.415.444		97.412.056.992		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	225	225	66.533.745.640	225	73.187.120.204	225	80.505.823.224	225	88.556.415.444	225	97.412.056.992		
5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas				770.097.600		924.117.120		1.108.940.544		1.330.728.653		1.596.874.383		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	770.097.600	4	924.117.120	4	1.108.940.544	4	1.330.728.653	4	1.596.874.383		
5.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14.290.900		37.149.080		44.578.896		53.494.675		64.193.610		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	14.290.900	1	37.149.080	1	44.578.896	1	53.494.675	1	64.193.610		
5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				412.898.016		535.477.618		642.573.142		771.087.771		925.305.324		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	412.898.016	12	535.477.618	12	642.573.142	12	771.087.771	12	925.305.324		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Milik Daerah pada Perangkat Daerah																
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4	4				4				4					4
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4				4				4					4
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2				2				2					2
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4				4				4					4
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4				4				4					4

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				33.399.132		80.078.958		96.094.750		115.313.700		138.376.440		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	33.399.132	2	80.078.958	2	96.094.750	2	115.313.700	2	138.376.440		
5.02.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000		90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	75.000.000	12	90.000.000	12	108.000.000	12	129.600.000	12	155.520.000		
5.02.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				64.498.945		77.398.734		92.878.481		111.454.177		133.745.012		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4	4	64.498.945	4	77.398.734	4	92.878.481	4	111.454.177	4	133.745.012		
5.02.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian				89.999.939		107.999.926		129.599.911		155.519.894		186.623.872		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	89.999.939	4	107.999.926	4	129.599.911	4	155.519.894	4	186.623.872		
5.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	75.000.000	4	90.000.000	4	108.000.000	4	129.600.000	4	155.520.000		
5.02.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000		90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	75.000.000	4	90.000.000	4	108.000.000	4	129.600.000	4	155.520.000		
5.02.01.1.05 - Administrasi				593.035.800		1.051.642.96 0		1.261.980.55 2		1.514.365.86 2		1.817.239.03 6		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Kepegawaian Perangkat Daerah																
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	10	10	593.035.800	10	1.051.642.960	10	1.261.980.552	10	1.514.365.862	10	1.817.239.036				
	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	2	2				2				2					2
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	10	10				10				10					10
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1				1				1					1
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	12				12				12					12
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	7	7				7				7					7

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disiplin Pegawai (Unit)													
5.02.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				55.108.500		66.130.200		79.365.240		95.227.488		114.272.986		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7	7	55.108.500	7	66.130.200	7	79.365.240	7	95.227.488	7	114.272.986		
5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				148.500.000		178.200.000		213.840.000		256.608.000		307.929.600		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	148.500.000	1	178.200.000	1	213.840.000	1	256.608.000	1	307.929.600		
5.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				121.898.800		186.278.560		223.534.272		268.241.126		321.889.352		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	10	10	121.898.800	10	186.278.560	10	223.534.272	10	268.241.126	10	321.889.352		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)													
5.02.01.1.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				125.000.000		150.000.000		180.000.000		216.000.000		259.200.000		
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	2	2	125.000.000	2	150.000.000	2	180.000.000	2	216.000.000	2	259.200.000		
5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				55.028.500		366.034.200		439.241.040		527.089.248		632.507.098		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	12	55.028.500	12	366.034.200	12	439.241.040	12	527.089.248	12	632.507.098		
5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				87.500.000		105.000.000		126.000.000		151.200.000		181.440.000		
Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	10	10	87.500.000	10	105.000.000	10	126.000.000	10	151.200.000	10	181.440.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perundang- Undangan (Orang)													
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.507.507.64 7		4.786.009.17 7		5.743.211.01 2		6.891.853.21 5		8.270.223.85 7		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	3.507.507.64 7	4	4.786.009.17 7	4	5.743.211.01 2	4	6.891.853.21 5	4	8.270.223.85 7		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				90.000.000		158.000.000		189.600.000		227.520.000		273.024.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	90.000.000	7	158.000.000	7	189.600.000	7	227.520.000	7	273.024.000		
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				902.829.814		1.083.395.77 7		1.300.074.93 2		1.560.089.91 9		1.872.107.90 2		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	902.829.814	10	1.083.395.77 7	10	1.300.074.93 2	10	1.560.089.91 9	10	1.872.107.90 2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				425.703.200		510.843.840		613.012.608		735.615.130		882.738.156		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	425.703.200	1	510.843.840	1	613.012.608	1	735.615.130	1	882.738.156		
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.868.691.73 3		2.242.430.08 0		2.690.916.09 6		3.229.099.31 5		3.874.919.17 8		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	1.868.691.73 3	4	2.242.430.08 0	4	2.690.916.09 6	4	3.229.099.31 5	4	3.874.919.17 8		
5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6.287.900		17.545.480		21.054.576		25.265.491		30.318.589		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	6.287.900	4	17.545.480	4	21.054.576	4	25.265.491	4	30.318.589		
5.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.550.000		130.860.000		157.032.000		188.438.400		226.126.080		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	11.550.000	12	130.860.000	12	157.032.000	12	188.438.400	12	226.126.080		
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				202.445.000		642.934.000		771.520.800		925.824.960		1.110.989.95 2		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	202.445.000	12	642.934.000	12	771.520.800	12	925.824.960	12	1.110.989.95 2		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.546.739.16 8		23.076.087.0 02		7.591.304.40 2		8.929.565.28 2		10.535.478.3 38		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	80	5.546.739.16 8	100	23.076.087.0 02	120	7.591.304.40 2	140	8.929.565.28 2	160	10.535.478.3 38		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3				3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10			
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.456.204.58 4		2.947.445.50 1		3.536.934.60 1		4.244.321.52 1		5.093.185.82 5		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10	10	2.456.204.58 4	10	2.947.445.50 1	10	3.536.934.60 1	10	4.244.321.52 1	10	5.093.185.82 5		
5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				900.000.000		17.500.000.0 00		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3	900.000.000	3	17.500.000.0 00	3	900.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000		
5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.190.534.58 4		2.628.641.50 1		3.154.369.80 1		3.785.243.76 1		4.542.292.51 3		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	3	80	2.190.534.58 4	100	2.628.641.50 1	120	3.154.369.80 1	140	3.785.243.76 1	160	4.542.292.51 3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.395.824.62 1		7.684.989.54 5		9.221.987.45 5		11.066.384.9 45		13.279.661.9 34		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.395.824.62 1	12	7.684.989.54 5	12	9.221.987.45 5	12	11.066.384.9 45	12	13.279.661.9 34		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12				12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12				12		12		12			
5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.638.520		13.166.224		15.799.469		18.959.363		22.751.235		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.638.520	12	13.166.224	12	15.799.469	12	18.959.363	12	22.751.235		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.775.248.90 4		2.130.298.68 5		2.556.358.42 2		3.067.630.10 6		3.681.156.12 7		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.775.248.90 4	12	2.130.298.68 5	12	2.556.358.42 2	12	3.067.630.10 6	12	3.681.156.12 7		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.617.937.19 7		5.541.524.63 6		6.649.829.56 4		7.979.795.47 6		9.575.754.57 2		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.617.937.19 7	12	5.541.524.63 6	12	6.649.829.56 4	12	7.979.795.47 6	12	9.575.754.57 2		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.036.657.20 0		4.903.988.64 0		5.884.786.36 8		7.061.743.64 2		8.474.092.36 9		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	20	20	4.036.657.20 0	20	4.903.988.64 0	20	5.884.786.36 8	20	7.061.743.64 2	20	8.474.092.36 9		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	69	69		69		69		69		69			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	252	252		252		252		252		252			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	24	24		24		24		24		24			
5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				767.290.000		920.748.000		1.104.897.60 0		1.325.877.12 0		1.591.052.54 4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	69	69	767.290.000	69	920.748.000	69	1.104.897.600	69	1.325.877.120	69	1.591.052.544		
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.635.964.000		1.963.156.800		2.355.788.160		2.826.945.792		3.392.334.950		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	1.635.964.000	20	1.963.156.800	20	2.355.788.160	20	2.826.945.792	20	3.392.334.950		
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.237.000		156.284.400		187.541.280		225.049.536		270.059.443		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	252	252	80.237.000	252	156.284.400	252	187.541.280	252	225.049.536	252	270.059.443		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.553.166.20 0		1.863.799.44 0		2.236.559.32 8		2.683.871.19 4		3.220.645.43 2		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	24	24	1.553.166.20 0	24	1.863.799.44 0	24	2.236.559.32 8	24	2.683.871.19 4	24	3.220.645.43 2		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.9 83		121.992.902. 615		118.765.771. 118		134.122.092. 119		151.795.556. 496	5.02.0.00.0.00.02.0 001 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kota Jambi	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.000.000		150.000.000		187.500.000		234.375.000		292.968.750		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	120.000.000	12	150.000.000	12	187.500.000	12	234.375.000	12	292.968.750		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000		150.000.000		187.500.000		234.375.000		292.968.750		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	120.000.000	12	150.000.000	12	187.500.000	12	234.375.000	12	292.968.750		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.336.000.000		670.000.000		775.000.000		906.250.000		1.070.312.500		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	1.336.000.000	15	670.000.000	15	775.000.000	15	906.250.000	15	1.070.312.500		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1				1			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				336.000.000		420.000.000		525.000.000		656.250.000		820.312.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	336.000.000	15	420.000.000	15	525.000.000	15	656.250.000	15	820.312.500		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.000.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.983		121.992.902.615		118.765.771.118		134.122.092.119		151.795.556.496	5.02.0.00.0.00.02.0002 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				404.500.000		455.625.000		519.531.250		599.414.063		699.267.578		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	4	4	404.500.000	4	455.625.000	4	519.531.250	4	599.414.063	4	699.267.578		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10		10		10		10		10			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				204.500.000		255.625.000		319.531.250		399.414.063		499.267.578		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	204.500.000	10	255.625.000	10	319.531.250	10	399.414.063	10	499.267.578		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)													
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.9 83		121.992.902. 615		118.765.771. 118		134.122.092. 119		151.795.556. 496	5.02.0.00.0.00.02.0 003 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang				354.500.000		405.625.000		469.531.250		549.414.063		649.267.578		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	354.500.000	10	405.625.000	10	469.531.250	10	549.414.063	10	649.267.578		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	1	1				1				1			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				204.500.000		255.625.000		319.531.250		399.414.063		499.267.578		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	204.500.000	10	255.625.000	10	319.531.250	10	399.414.063	10	499.267.578		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.9 83		121.992.902. 615		118.765.771. 118		134.122.092. 119		151.795.556. 496	5.02.0.00.0.00.02.0 004 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				325.250.000		369.062.500		423.828.125		492.285.156		577.856.445		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	325.250.000	10	369.062.500	10	423.828.125	10	492.285.156	10	577.856.445		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	4	4				4				4			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				175.250.000		219.062.500		273.828.125		342.285.156		427.856.445		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	175.250.000	10	219.062.500	10	273.828.125	10	342.285.156	10	427.856.445		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	4	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.9 83		121.992.902. 615		118.765.771. 118		134.122.092. 119		151.795.556. 496	5.02.0.00.0.00.02.0 005 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				354.500.000		405.625.000		469.531.250		549.414.063		649.267.578		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	354.500.000	8	405.625.000	8	469.531.250	8	549.414.063	8	649.267.578		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				204.500.000		255.625.000		319.531.250		399.414.063		499.267.578		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	204.500.000	8	255.625.000	8	319.531.250	8	399.414.063	8	499.267.578		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.983		121.992.902.615		118.765.771.118		134.122.092.119		151.795.556.496	5.02.0.00.0.00.02.0006 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	62.500.000	12	78.125.000	12	97.656.250		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah				337.000.000		383.750.000		442.187.500		515.234.375		606.542.969		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	337.000.000	8	383.750.000	8	442.187.500	8	515.234.375	8	606.542.969		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2	2				2				2			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				187.000.000		233.750.000		292.187.500		365.234.375		456.542.969		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	187.000.000	8	233.750.000	8	292.187.500	8	365.234.375	8	456.542.969		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.9 83		121.992.902. 615		118.765.771. 118		134.122.092. 119		151.795.556. 496	5.02.0.00.0.00.02.0 007 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.000.000		75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	75.000.000	12	93.750.000	12	117.187.500	12	146.484.375		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	75.000.000	12	93.750.000	12	117.187.500	12	146.484.375		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				387.000.000		433.750.000		492.187.500		565.234.375		656.542.969		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	387.000.000	8	433.750.000	8	492.187.500	8	565.234.375	8	656.542.969		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2				2				2			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				187.000.000		233.750.000		292.187.500		365.234.375		456.542.969		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	187.000.000	8	233.750.000	8	292.187.500	8	365.234.375	8	456.542.969		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.983		121.992.902.615		118.765.771.118		134.122.092.119		151.795.556.496	5.02.0.00.0.00.02.0008 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				60.000.000		75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	75.000.000	12	93.750.000	12	117.187.500	12	146.484.375		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	75.000.000	12	93.750.000	12	117.187.500	12	146.484.375		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				357.750.000		397.187.500		446.484.375		508.105.469		585.131.836		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2	2	357.750.000	2	397.187.500	2	446.484.375	2	508.105.469	2	585.131.836		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8		8		8		8		8			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				157.750.000		197.187.500		246.484.375		308.105.469		385.131.836		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	157.750.000	8	197.187.500	8	246.484.375	8	308.105.469	8	385.131.836		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)													
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.9 83		121.992.902. 615		118.765.771. 118		134.122.092. 119		151.795.556. 496	5.02.0.00.0.00.02.0 009 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.000.000		75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	75.000.000	12	93.750.000	12	117.187.500	12	146.484.375		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	75.000.000	12	93.750.000	12	117.187.500	12	146.484.375		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang				442.500.000		503.125.000		578.906.250		673.632.813		792.041.016		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	442.500.000	3	503.125.000	3	578.906.250	3	673.632.813	3	792.041.016		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11				11				11			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				242.500.000		303.125.000		378.906.250		473.632.813		592.041.016		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	242.500.000	11	303.125.000	11	378.906.250	11	473.632.813	11	592.041.016		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	3	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				93.515.730.9 83		121.992.902. 615		118.765.771. 118		134.122.092. 119		151.795.556. 496	5.02.0.00.0.00.02.0 010 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci	
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.000.000		75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	75.000.000	12	93.750.000	12	117.187.500	12	146.484.375		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	75.000.000	12	93.750.000	12	117.187.500	12	146.484.375		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				349.000.000		386.250.000		432.812.500		491.015.625		563.769.531		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	349.000.000	3	386.250.000	3	432.812.500	3	491.015.625	3	563.769.531		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7		7		7		7		7			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				149.000.000		186.250.000		232.812.500		291.015.625		363.769.531		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	149.000.000	7	186.250.000	7	232.812.500	7	291.015.625	7	363.769.531		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				0		0		0		0		0		
Meningkatnya tata kelola aset daerah				0		0		0		0		0	5.02.0.00.0.00.02.000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN				24.317.088.045		35.329.281.324		40.034.298.953		48.954.933.242		59.888.138.013		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDAPATAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	447.741.082	100	1.660.857.48 4	100	1.993.028.98 1	100	2.391.634.77 8	100	2.869.961.73 3	5.02.0.00.0.00.02.0 000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				12.620.774.5 35		20.708.889.3 62		21.758.808.9 99		26.110.570.8 00		31.332.684.9 57		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Persetujuan/Penolak an)	0	0	447.741.082	12	1.660.857.48 4	12	1.993.028.98 1	12	2.391.634.77 8	12	2.869.961.73 3		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian	0	0		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen)													
5.02.04.1.01.0009 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				0		500.000.000		600.000.000		720.000.000		864.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen)	0	0	0	12	500.000.000	12	600.000.000	12	720.000.000	12	864.000.000		
5.02.04.1.01.0011 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				0		100.000.000		120.000.000		144.000.000		172.800.000		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Persetujuan/Penolak an)	0	0	0	12	100.000.000	12	120.000.000	12	144.000.000	12	172.800.000		
5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				185.659.445		546.359.520		655.631.424		786.757.709		944.109.251		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	4	4	185.659.445	4	546.359.520	4	655.631.424	4	786.757.709	4	944.109.251		
5.02.04.1.01.0013 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				262.081.637		514.497.964		617.397.557		740.877.069		889.052.482		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	262.081.637	12	514.497.964	12	617.397.557	12	740.877.069	12	889.052.482		
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	75	76	3.680.783.61 2	76,5	7.257.332.14 0	77	5.616.940.33 4	77,5	6.740.328.40 1	100	8.088.394.08 2		
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				12.620.774.5 35		20.708.889.3 62		21.758.808.9 99		26.110.570.8 00		31.332.684.9 57		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12	12	3.680.783.61 2	12	7.257.332.14 0	12	5.616.940.33 4	12	6.740.328.40 1	12	8.088.394.08 2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
5.02.04.1.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3.680.783.61 2		6.257.332.14 0		4.416.940.33 4		5.300.328.40 1		6.360.394.08 2		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12	12	3.680.783.61 2	12	6.257.332.14 0	12	4.416.940.33 4	12	5.300.328.40 1	12	6.360.394.08 2		
5.02.04.1.01.0014 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0		1.000.000.00 0		1.200.000.00 0		1.440.000.00 0		1.728.000.00 0		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0	12	1.000.000.00 0	12	1.200.000.00 0	12	1.440.000.00 0	12	1.728.000.00 0		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.3 51		26.411.091.7 00		32.424.329.6 38		39.822.970.0 63		48.929.782.1 98		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				12.620.774.5 35		20.708.889.3 62		21.758.808.9 99		26.110.570.8 00		31.332.684.9 57		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	0	0	8.492.249.84 1	12	11.790.699.7 38	12	14.148.839.6 84	12	16.978.607.6 21	12	20.374.329.1 42		
	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	-	-		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	-	-		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	49	49		49		49		49		49			
5.02.04.1.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				0		250.000.000		300.000.000		360.000.000		432.000.000		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	0	0	0	12	250.000.000	12	300.000.000	12	360.000.000	12	432.000.000		
5.02.04.1.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan				429.470.110		515.364.132		618.436.958		742.124.350		890.549.220		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kebijakan Pajak Daerah														
Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4	4	429.470.110	4	515.364.132	4	618.436.958	4	742.124.350	4	890.549.220		
5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2.748.952.407		3.298.742.888		3.958.491.466		4.750.189.759		5.700.227.711		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12	2.748.952.407	12	3.298.742.888	12	3.958.491.466	12	4.750.189.759	12	5.700.227.711		
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4.858.527.664		5.830.233.197		6.996.279.836		8.395.535.803		10.074.642.964		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	49	49	4.858.527.664	49	5.830.233.197	49	6.996.279.836	49	8.395.535.803	49	10.074.642.964		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				0		349.999.929		419.999.914		504.000.000		604.799.996		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	0	0	0	12	349.999.929	12	419.999.914	12	504.000.000	12	604.799.996		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				0		500.000.000		600.000.000		720.000.000		864.000.000		
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	-	-	0	12	500.000.000	12	600.000.000	12	720.000.000	12	864.000.000		
5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				455.299.660		546.359.592		655.631.510		786.757.709		944.109.251		
Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Laporan)	12	12	455.299.660	12	546.359.592	12	655.631.510	12	786.757.709	12	944.109.251		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				0		500.000.000		600.000.000		720.000.000		864.000.000		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	-	-	0	12	500.000.000	12	600.000.000	12	720.000.000	12	864.000.000		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.3 51		26.411.091.7 00		32.424.329.6 38		39.822.970.0 63		48.929.782.1 98	5.02.0.00.0.00.02.0 001 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kota Jambi	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.013.908.54 5		2.517.385.68 1		3.146.732.10 2		3.933.415.12 7		4.916.768.90 9		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	488,293	488,293	2.013.908.54 5	488,293	2.517.385.68 1	488,293	3.146.732.10 2	488,293	3.933.415.12 7	488,293	4.916.768.90 9		
	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	25.000	25.000				25.000		25.000		25.000			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	11	11				11		11		11			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.663.908.54 5		2.079.885.68 1		2.599.857.10 2		3.249.821.37 7		4.062.276.72 1		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	11	11	1.663.908.54 5	11	2.079.885.68 1	11	2.599.857.10 2	11	3.249.821.37 7	11	4.062.276.72 1		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				100.000.000		125.000.000		156.250.000		195.312.500		244.140.625		
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	488,293	488,293	100.000.000	488,293	125.000.000	488,293	156.250.000	488,293	195.312.500	488,293	244.140.625		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		610.351.563		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangghinya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	25.000	25.000	250.000.000	25.000	312.500.000	25.000	390.625.000	25.000	488.281.250	25.000	610.351.563		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.3 51		26.411.091.7 00		32.424.329.6 38		39.822.970.0 63		48.929.782.1 98	5.02.0.00.0.00.02.0 002 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.203.132.28 9		1.503.915.36 1		1.879.894.20 2		2.349.867.75 2		2.937.334.69 1		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	10	10	1.203.132.28 9	10	1.503.915.36 1	10	1.879.894.20 2	10	2.349.867.75 2	10	2.937.334.69 1		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	61,657	61,657				61,657				61,657			
	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	20.000	20.000				20.000				20.000			
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				903.132.289		1.128.915.36 1		1.411.144.20 2		1.763.930.25 2		2.204.912.81 5		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	10	10	903.132.289	10	1.128.915.36 1	10	1.411.144.20 2	10	1.763.930.25 2	10	2.204.912.81 5		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		122.070.313		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	61,657	61,657	50.000.000	61,657	62.500.000	61,657	78.125.000	61,657	97.656.250	61,657	122.070.313		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		610.351.563		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	20.000	20.000	250.000.000	20.000	312.500.000	20.000	390.625.000	20.000	488.281.250	20.000	610.351.563		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.3 51		26.411.091.7 00		32.424.329.6 38		39.822.970.0 63		48.929.782.1 98	5.02.0.00.0.00.02.0 003 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				997.026.588		1.246.283.23 5		1.557.854.04 4		1.947.317.55 5		2.434.146.94 4		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	48,013	48,013	997.026.588	48,013	1.246.283.23 5	48,013	1.557.854.04 4	48,013	1.947.317.55 5	48,013	2.434.146.94 4		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	4	4				4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				747.026.588		933.783.235		1.167.229.04 4		1.459.036.30 5		1.823.795.38 1		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	4	4	747.026.588	4	933.783.235	4	1.167.229.04 4	4	1.459.036.30 5	4	1.823.795.38 1		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		122.070.313		
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	48,013	48,013	50.000.000	48,013	62.500.000	48,013	78.125.000	48,013	97.656.250	48,013	122.070.313		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				200.000.000		250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000	200.000.000	15.000	250.000.000	15.000	312.500.000	15.000	390.625.000	15.000	488.281.250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.3 51		26.411.091.7 00		32.424.329.6 38		39.822.970.0 63		48.929.782.1 98	5.02.0.00.0.00.02.0 004 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				953.437.940		1.191.797.42 5		1.489.746.78 1		1.862.183.47 7		2.327.729.34 6		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	6	6	953.437.940	6	1.191.797.42 5	6	1.489.746.78 1	6	1.862.183.47 7	6	2.327.729.34 6		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	34,954	34,954		34,954		34,954		34,954					
	Jumlah Dokumen Tertangguhannya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000					
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				703.437.940		879.297.425		1.099.121.78 1		1.373.902.22 7		1.717.377.78 3		
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	6	6	703.437.940	6	879.297.425	6	1.099.121.78 1	6	1.373.902.22 7	6	1.717.377.78 3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Pajak Daerah	Daerah (Sarana dan Prasarana)													
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		122.070.313		
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	34,954	34,954	50.000.000	34,954	62.500.000	34,954	78.125.000	34,954	97.656.250	34,954	122.070.313		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				200.000.000		250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000	200.000.000	15.000	250.000.000	15.000	312.500.000	15.000	390.625.000	15.000	488.281.250		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.351		26.411.091.700		32.424.329.638		39.822.970.063		48.929.782.198	5.02.0.00.0.00.02.0005 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				787.483.232		984.354.040		1.230.442.550		1.538.053.188		1.922.566.485		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	32,375	32,375	787.483.232	32,375	984.354.040	32,375	1.230.442.550	32,375	1.538.053.188	32,375	1.922.566.485		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				537.483.232		671.854.040		839.817.550		1.049.771.938		1.312.214.922		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	4	4	537.483.232	4	671.854.040	4	839.817.550	4	1.049.771.938	4	1.312.214.922		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		122.070.313		
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	32,375	32,375	50.000.000	32,375	62.500.000	32,375	78.125.000	32,375	97.656.250	32,375	122.070.313		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				200.000.000		250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000	200.000.000	15.000	250.000.000	15.000	312.500.000	15.000	390.625.000	15.000	488.281.250		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.3 51		26.411.091.7 00		32.424.329.6 38		39.822.970.0 63		48.929.782.1 98	5.02.0.00.0.00.02.0 006 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				932.864.844		1.166.081.05 5		1.457.601.31 9		1.822.001.64 8		2.277.502.06 1		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	40,389	40,389	932.864.844	40,389	1.166.081.05 5	40,389	1.457.601.31 9	40,389	1.822.001.64 8	40,389	2.277.502.06 1		
	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	7	7		7		7		7		7			
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana				682.864.844		853.581.055		1.066.976.31 9		1.333.720.39 8		1.667.150.49 8		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Pajak Daerah														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	7	7	682.864.844	7	853.581.055	7	1.066.976.319	7	1.333.720.398	7	1.667.150.498		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		122.070.313		
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	40,389	40,389	50.000.000	40,389	62.500.000	40,389	78.125.000	40,389	97.656.250	40,389	122.070.313		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				200.000.000		250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000	200.000.000	15.000	250.000.000	15.000	312.500.000	15.000	390.625.000	15.000	488.281.250		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.351		26.411.091.700		32.424.329.638		39.822.970.063		48.929.782.198	5.02.0.00.0.00.02.0007 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.091.731.005		1.364.663.756		1.705.829.695		2.132.287.119		2.665.358.899		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	4	4	1.091.731.00 5	4	1.364.663.75 6	4	1.705.829.69 5	4	2.132.287.11 9	4	2.665.358.89 9		
	Jumlah Dokumen Tertangghinya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	43,716	43,716		43,716		43,716		43,716		43,716			
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				816.731.005		1.020.913.75 6		1.276.142.19 5		1.595.177.74 4		1.993.972.18 0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	4	4	816.731.005	4	1.020.913.75 6	4	1.276.142.19 5	4	1.595.177.74 4	4	1.993.972.18 0		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		183.105.469		
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	43,716	43,716	75.000.000	43,716	93.750.000	43,716	117.187.500	43,716	146.484.375	43,716	183.105.469		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				200.000.000		250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000	200.000.000	15.000	250.000.000	15.000	312.500.000	15.000	390.625.000	15.000	488.281.250		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.3 51		26.411.091.7 00		32.424.329.6 38		39.822.970.0 63		48.929.782.1 98	5.02.0.00.0.00.02.0 008 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.207.200.00 0		1.509.000.00 0		1.886.250.00 0		2.357.812.50 0		2.947.265.62 5		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	7	7	1.207.200.00 0	7	1.509.000.00 0	7	1.886.250.00 0	7	2.357.812.50 0	7	2.947.265.62 5		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	19,088	19,088		19,088		19,088		19,088					
	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				932.200.000		1.165.250.00 0		1.456.562.50 0		1.820.703.12 5		2.275.878.90 6		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	7	7	932.200.000	7	1.165.250.00 0	7	1.456.562.50 0	7	1.820.703.12 5	7	2.275.878.90 6		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		183.105.469		
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	19,088	19,088	75.000.000	19,088	93.750.000	19,088	117.187.500	19,088	146.484.375	19,088	183.105.469		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				200.000.000		250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000	200.000.000	15.000	250.000.000	15.000	312.500.000	15.000	390.625.000	15.000	488.281.250		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.3 51		26.411.091.7 00		32.424.329.6 38		39.822.970.0 63		48.929.782.1 98	5.02.0.00.0.00.02.0 009 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.319.279.55 1		1.649.099.43 9		2.061.374.29 8		2.576.717.87 3		3.220.897.34 2		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	6	6	1.319.279.55 1	6	1.649.099.43 9	6	2.061.374.29 8	6	2.576.717.87 3	6	3.220.897.34 2		
	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	39,248	39,248		39,248		39,248		39,248		39,248			
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.044.279.55 1		1.305.349.43 9		1.631.686.79 8		2.039.608.49 8		2.549.510.62 3		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	6	6	1.044.279.55 1	6	1.305.349.43 9	6	1.631.686.79 8	6	2.039.608.49 8	6	2.549.510.62 3		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		183.105.469		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	39,248	39,248	75.000.000	39,248	93.750.000	39,248	117.187.500	39,248	146.484.375	39,248	183.105.469		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				200.000.000		250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000	200.000.000	15.000	250.000.000	15.000	312.500.000	15.000	390.625.000	15.000	488.281.250		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				20.188.563.3 51		26.411.091.7 00		32.424.329.6 38		39.822.970.0 63		48.929.782.1 98	5.02.0.00.0.00.02.0 010 - UPTD-PPD Bapenda Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.190.249.51 6		1.487.811.97 0		1.859.764.96 3		2.324.706.20 3		2.905.882.75 4		
Tersedianya Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000	1.190.249.51 6	15.000	1.487.811.97 0	15.000	1.859.764.96 3	15.000	2.324.706.20 3	15.000	2.905.882.75 4		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	47,611	47,611		47,611		47,611		47,611					
	Jumlah Sarana dan Prasarana		4		4		4		4					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)													
5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				915.249.576		1.144.061.970		1.430.077.463		1.787.596.828		2.234.496.035		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)		4	915.249.576	4	1.144.061.970	4	1.430.077.463	4	1.787.596.828	4	2.234.496.035		
5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				75.000.000		93.750.000		117.187.500		146.484.375		183.105.469		
Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	47,611	47,611	75.000.000	47,611	93.750.000	47,611	117.187.500	47,611	146.484.375	47,611	183.105.469		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				199.999.940		250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	15.000	15.000	199.999.940	15.000	250.000.000	15.000	312.500.000	15.000	390.625.000	15.000	488.281.250		

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	

		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator	Formulasi	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	(Jumlah PAD ÷ Jumlah Pendapatan Pada APBD) x 100%	%	44.49	44.69	44.89	45.09	45.29	45,49	
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(Total Penerimaan Pajak Daerah ÷ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)) x 100%	%	0.66	0.69	0.71	0.73	0.75	0,77	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Formulasi	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$(\text{Jumlah PAD} \div \text{Jumlah Pendapatan Pada APBD}) \times 100\%$	%	44.49	44.69	44.89	45.09	45.29	45.49	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 untuk menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. RENSTRA diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan dan merupakan awal dari proses akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

Keberhasilan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi **”Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho ALLAH SWT”** akan sangat perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari segala sektor, konsistensi dalam kebijakan dan implementasi serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif sehingga pada akhirnya visi Jambi MANTAP dapat tercapai.

*“GAGAL DALAM MERENCANAKAN ADALAH MERENCANAKAN
KEGAGALAN”*

*“RENCANA YANG PALING BAIK ADALAH RENCANA YANG ALLAH SWT
TENTUKAN UNTUK HAMBANYA”*

DAN BERENCANALAH KALIAN, ALLAH MEMBUAT RENCANA,
DAN ALLAH SEBAIK- BAIK PERENCANA
(ALI IMRAN : 54)